



SustainaBlue

HEIs stands for Higher Education Institutions

Perencanaan Tata Ruang Laut (MSP)

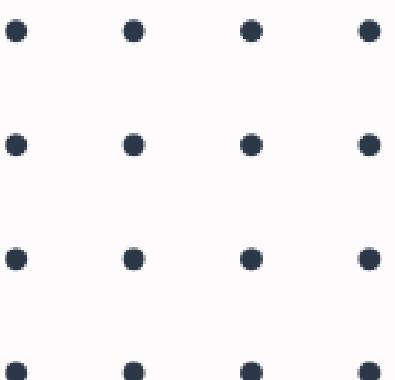
Modul 5: Manajemen Terpadu: Perencanaan, Manajemen, dan Tata Kelola

Durasi: 1 Jam



Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Project: 101129136 – SustainaBlue – ERASMUS-EDU-2023-CBHE



MITRA PROYEK

Malaysia



Greece



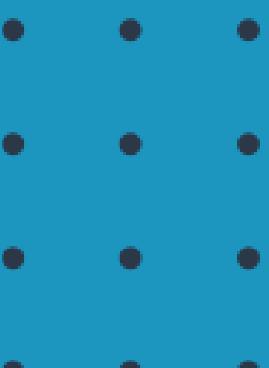
Co-funded by
the European Union

Didanai oleh Uni Eropa. Namun pandangan dan pendapat yang diungkapkan hanya milik penulis dan tidak selalu mencerminkan pendapat Uni Eropa atau Badan Eksekutif Pendidikan dan Kebudayaan Eropa (EACEA). Baik Uni Eropa maupun EACEA tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas mereka.
Proyek: 101129136 — SustainaBlue — ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Indonesia



Cyprus





Isi

01

Apa itu Perencanaan Tata Ruang Laut (MSP)?

02

Langkah-langkah dalam Perencanaan Tata Ruang Laut

03

Manfaat Perencanaan Tata Ruang Laut

04

MSP dalam Praktek

05

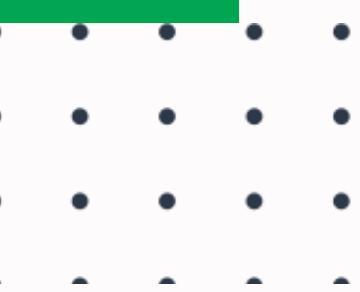
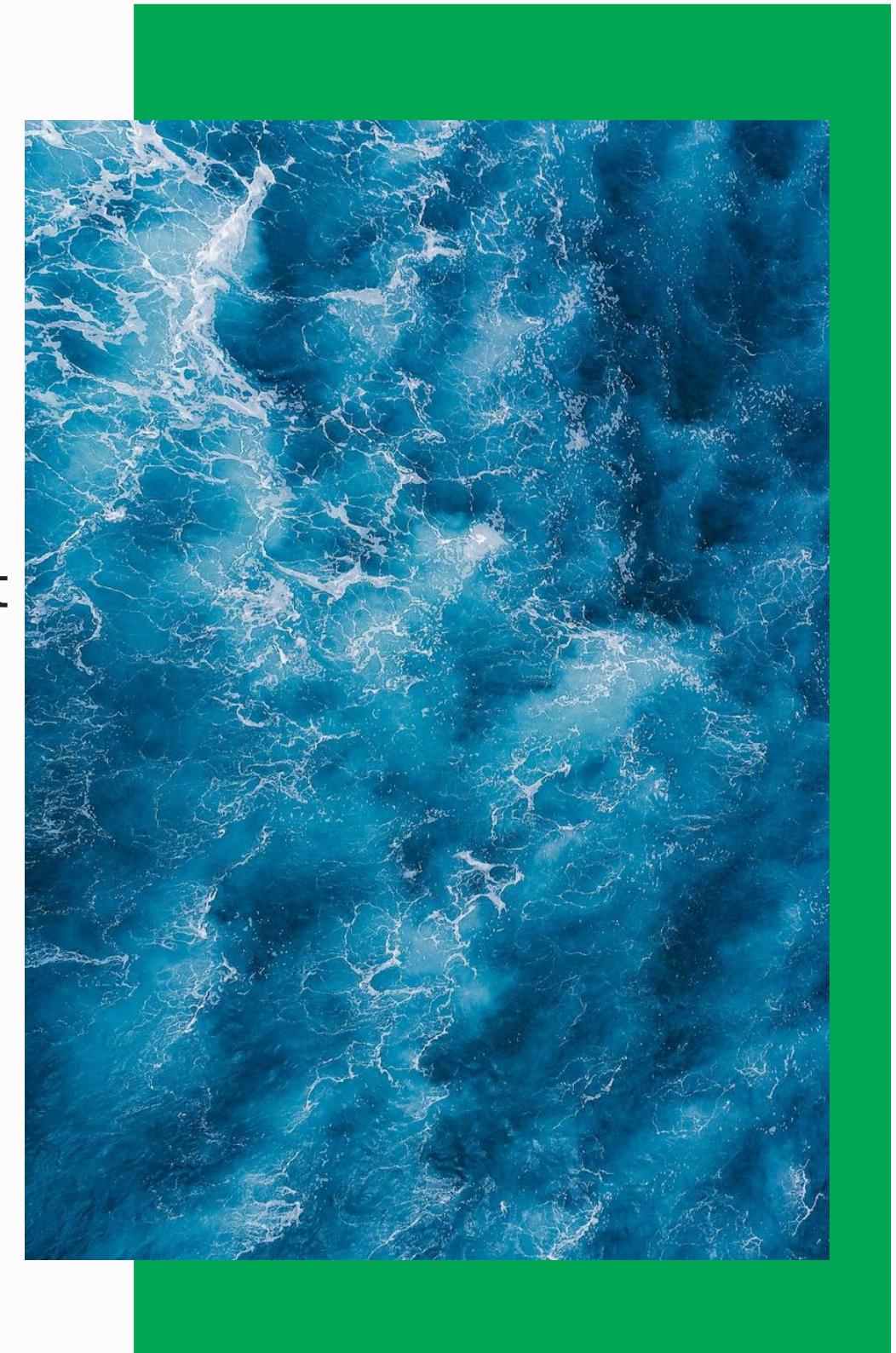
Kegiatan: Simulasi MSP

06

Ringkasan

07

Referensi



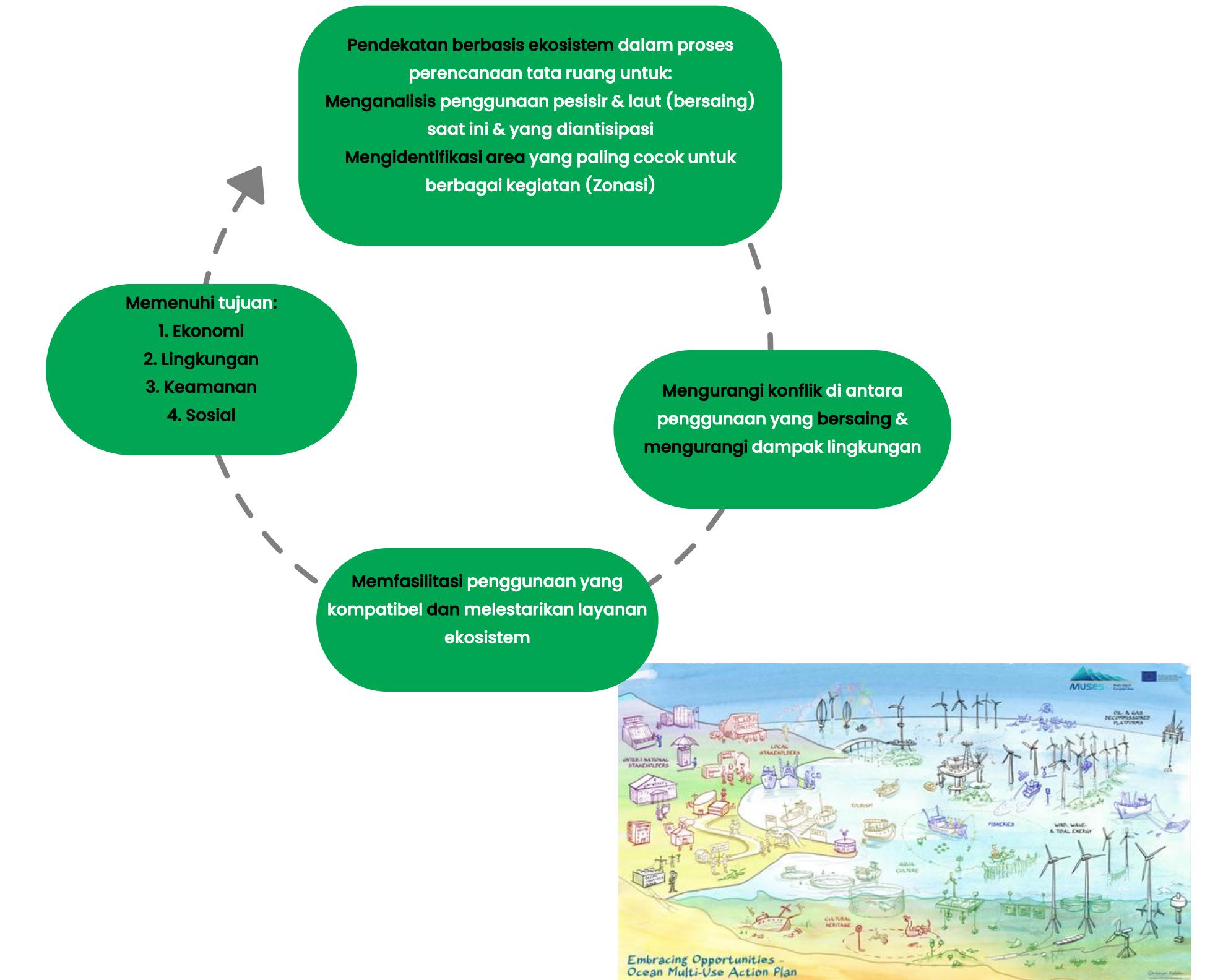
Apa itu Perencanaan Tata Ruang Laut (MSP)?

- **MSP** adalah proses untuk mengalokasikan ruang laut dengan penggunaan yang berbeda melalui cara yang mengurangi konflik dan melindungi ekosistem, yaitu:
- 1. Konservasi
- 2. Kegiatan ekonomi (misalnya perikanan, pelayaran, pariwisata)
- 3. Nilai-nilai budaya dan sosial

Berdasarkan data ekologi dan sosial-ekonomi digunakan dalam membuat keputusan yang tepat dan membantu memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk generasi sekarang dan masa depan.

Perencanaan Tata Ruang Laut (MSP) adalah sarana penting untuk mencapai tujuan tata kelola laut global dan agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, khususnya target 14.2 dari SDG14, yaitu, **mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan**.

Pada dasarnya, proses kebijakan publik bagi masyarakat digunakan untuk menentukan pengelolaan lautan & pantai dapat digunakan dan dilindungi secara berkelanjutan untuk saat ini dan untuk generasi mendatang.



(Ehler & Douvere, 2009)

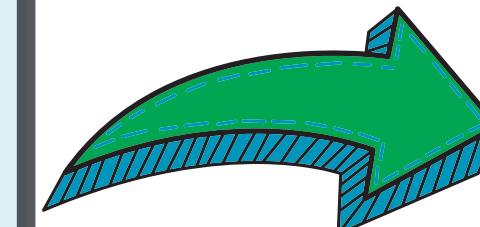


Langkah-langkah dalam Perencanaan Tata Ruang Laut

1

Tentukan tujuan dan batasan

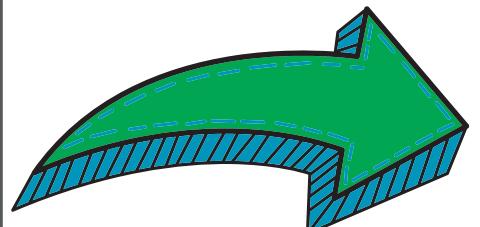
Tentukan tujuan rencana, seperti perlindungan keanekaragaman hayati, pertumbuhan ekonomi.



2

Kumpulkan data dan analisis pemangku kepentingan

1. Data ekologis: habitat, distribusi spesies.
2. Data sosial-ekonomi: mata pencaharian, industri.
3. Pemetaan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kepentingan dan konflik.



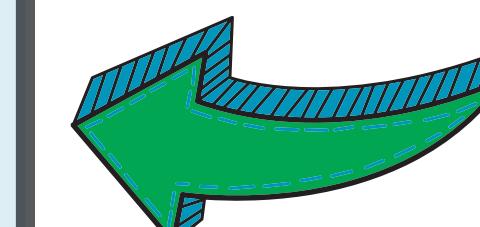
3

Pemetaan penggunaan dan konflik

1. Identifikasi penggunaan yang tumpang tindih, seperti penangkapan ikan dan pariwisata
2. Visualisasi area bertekanan tinggi.

Penerapan, pemantauan, dan penyesuaian rencana

1. Evaluasi efektivitas.
2. Penyesuaian informasi.

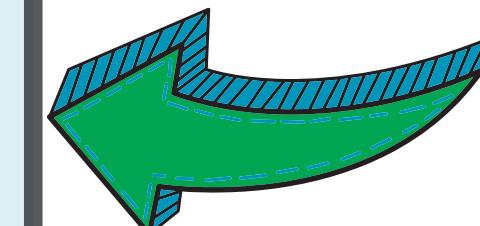


6

Penetapan kerangka hukum dan penegakan hukum

1. Mengintegrasikan MSP ke dalam undang-undang nasional.
2. Menentukan tanggung jawab dan hukuman.

5



4

Pengembangan zonasi dan pengelolaan zona untuk:

1. Kawasan konservasi
2. Tempat pemancingan
3. Jalur pengiriman
4. Lokasi wisata
5. Draf aturan manajemen untuk setiap zona.

Manfaat Perencanaan Tata Ruang Laut



→ Resolusi konflik



→ Ekonomi



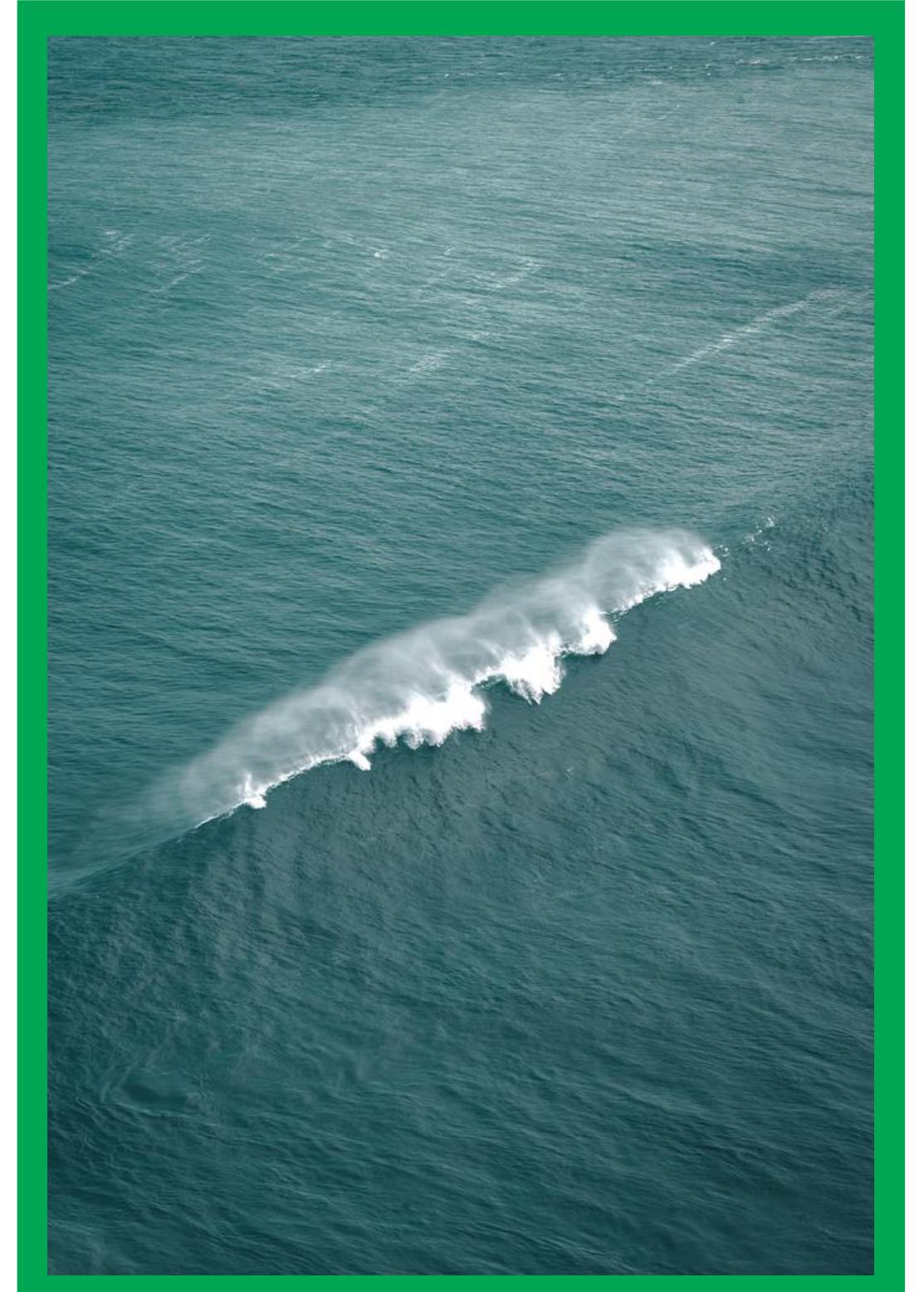
Co-funded by
the European Union



→ Keanekaragaman
Hayati



→ Kepentingan
Komunitas





MSP dalam Praktek

Arahan MSP Uni Eropa (2014):

- Mengharuskan negara-negara pesisir UE untuk mengembangkan rencana MSP.
- Fokus pada pertumbuhan ekonomi maritim dan konservasi yang berkelanjutan.

Indonesia's MSP:

Undang-undang zonasi laut menunjukkan:

- Zona penangkapan ikan
- Kawasan lindung laut (KKP)
- Zona pengembangan infrastruktur
- Mendukung perikanan berkelanjutan dan pariwisata bahari.

PEMSEA Initiatives in Southeast Asia:

- Membantu negara mengintegrasikan MSP ke dalam undang-undang nasional.
- Mempromosikan pendekatan berbasis ekosistem.

Contoh Hasil:

1. Mengurangi konflik antara pariwisata dan penangkapan ikan di zona pesisir.
2. Pedoman yang jelas untuk penempatan ladang angin lepas pantai.

Komponen Utama Keberhasilan MSP

Kerangka hukum dan kelembagaan yang jelas:

- Undang-undang dan kebijakan harus mengesahkan MSP (UNESCO-IOC, 2017).

Partisipasi pemangku kepentingan:

- Proses inklusif memastikan kepatuhan dan keberhasilan (Pomeroy & Douvere, 2008).

Pengambilan keputusan berbasis sains:

- MSP mengintegrasikan data ekologi, ekonomi, dan budaya.

Manajemen adaptif:

- Rencana dinamis, diperbarui dengan data baru dan umpan balik pemangku kepentingan.

Pemantauan dan evaluasi:

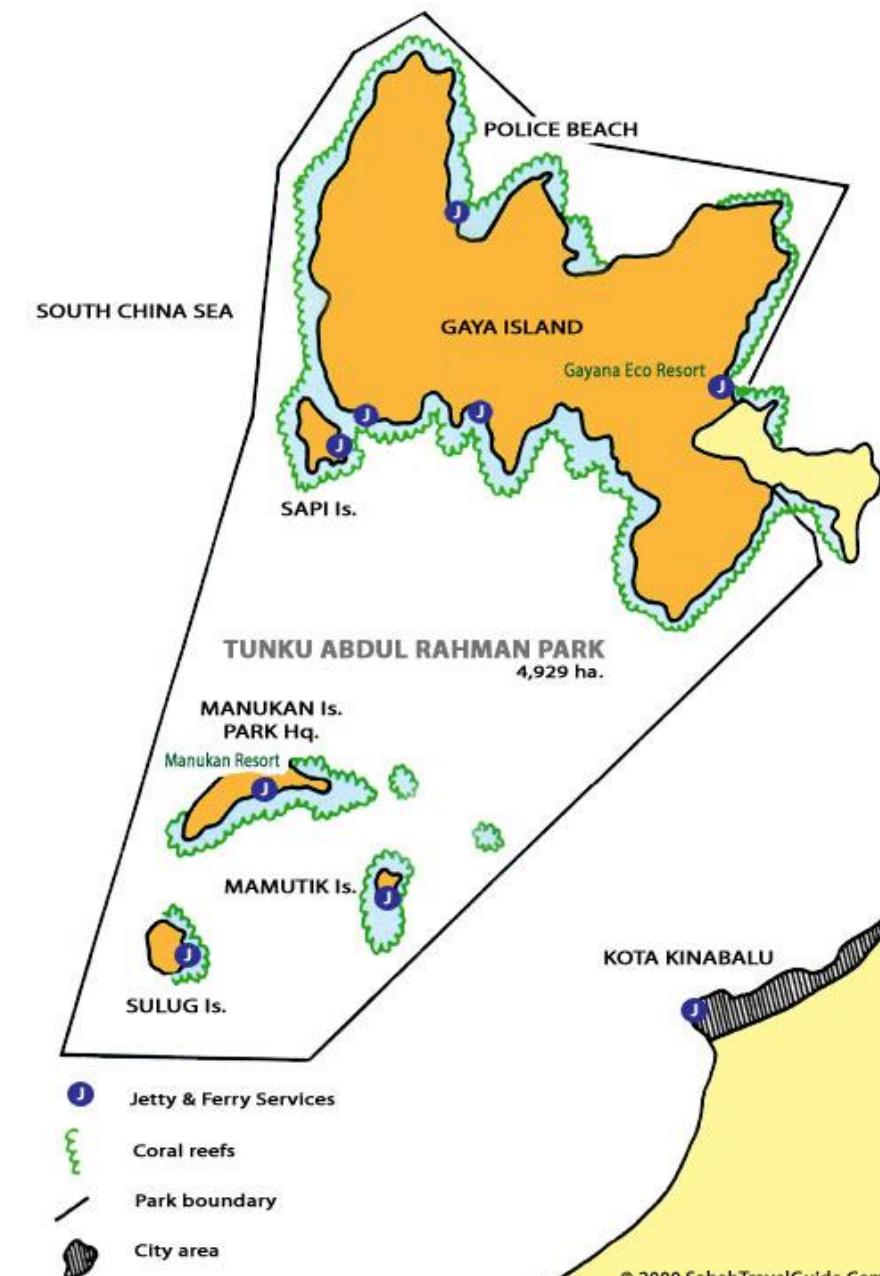
- Memastikan efektivitas jangka panjang.

Contoh Peta MSP (Malaysia):

Contoh zonasi Taman Tunku

Abdul Rahman (Sabah).

Referensi: Taman Sabah (2020).



MSPglobal 2.0 – Memajukan Perencanaan Tata Ruang Laut

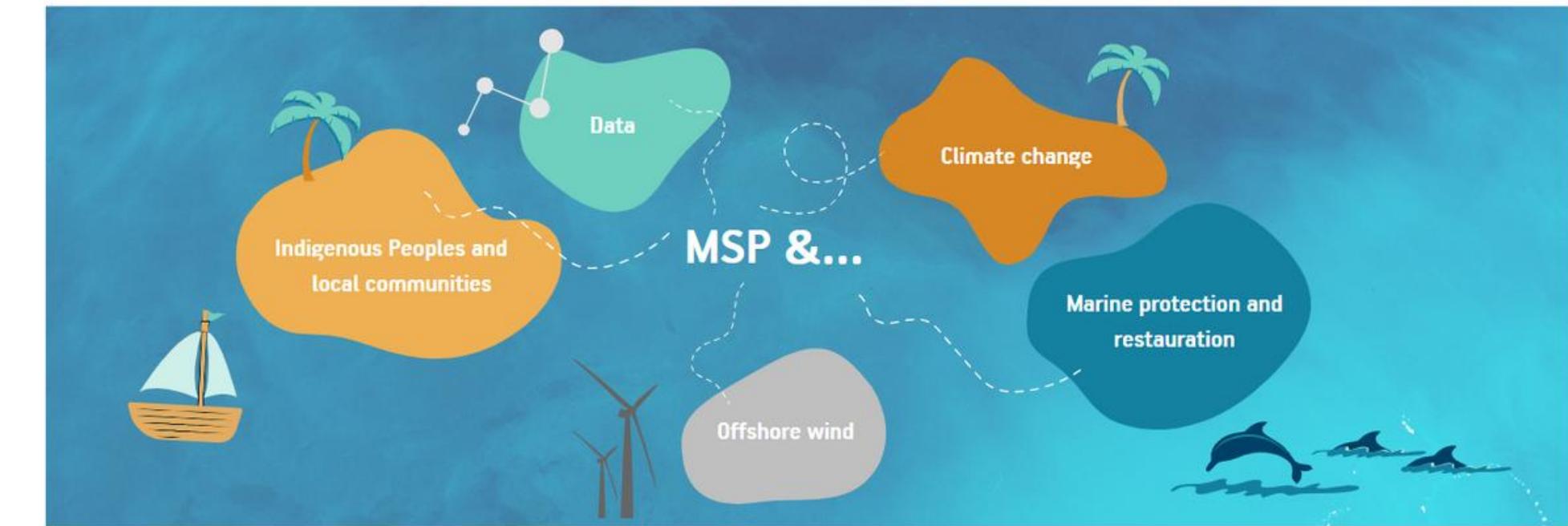
MSP adalah kunci untuk mencapai SDG 14.2: mengelola dan melindungi ekosistem laut/pesisir secara berkelanjutan.

Kemitraan UNESCO-IOC & Komisi Eropa meluncurkan MSPglobal pada tahun 2018; diperbarui ke MSPglobal 2.0 (2023–2025).

Area yang difokuskan:

1. Percontohan MSP lintas batas di Teluk Guinea dan Pasifik Barat.
2. Pengembangan alat dan metodologi MSP baru.
3. Peningkatan kapasitas: pelatihan nasional, lokakarya, dan kursus online.
4. Memperkuat tata kelola laut daerah.
5. Mendukung Dekade Kelautan PBB melalui MSP berbasis pengetahuan yang partisipatif.

UNESCO-IOC memetakan topik spesifik terkait MSP yang sedang ditangani proyek ini bekerja sama dengan para ahli:



Sumber: UNESCO-IOC. (2024). MSPglobal 2.0:

Perencanaan Tata Ruang Laut untuk Dekade Kelautan.

IOC/BRO/2024/3.



Kegiatan: Simulasi MSP

- Simulasikan zonasi untuk teluk pesisir dengan banyak kegunaan.
- Tetapkan area untuk memancing, pariwisata, transportasi, perlindungan.
- Mbenarkan keputusan berdasarkan data dan kebutuhan pemangku kepentingan.



Ringkasan

- **MSP** mengalokasikan **ruang laut** untuk mengurangi konflik dan melindungi sumber daya.
- Hal ini **menggunakan data ilmiah** dan **masukan pemangku kepentingan** untuk **memandu keputusan zonasi**.

MSP yang efektif:

1. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
2. Melestarikan keanekaragaman hayati.
3. Menyeimbangkan pengelolaan laut
4. Pemantauan berkelanjutan dan manajemen adaptif guna memastikan rencana tetap efektif.



Referensi



Co-funded by
the European Union

- European Union. (2014). Directive 2014/89/EU establishing a framework for maritime spatial planning. Official Journal of the European Union.
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0089>
- PEMSEA. (2022). Marine spatial planning in the East Asian Seas region. <https://pemsea.org>
- Ehler, C., & Douvere, F. (2009). Marine spatial planning: A step-by-step approach toward ecosystem-based management. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186559>
- Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries. (2020). Marine Spatial Planning in Indonesia. (internal reports, or publicly available publications).
- Ehler, C., & Douvere, F. (2009). Marine spatial planning: A step-by-step approach toward ecosystem-based management. UNESCO-IOC.
- IOC-UNESCO. (2017). Marine Spatial Planning: A guide to policy and practice.
- IOC-UNESCO. (2021). MSP global status and trends.
- Pomeroy, R. S., & Douvere, F. (2008). The engagement of stakeholders in the marine spatial planning process. *Marine Policy*, 32(5), 816-822.
- Sabah Parks. (2020). Annual Report.





SustainaBlue
HEIs stands for Higher Education Institutions

THANK YOU

ASSOC. PROF. DR MAHADI MOHAMMAD



+6012-472 2912



mahadi@usm.my

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
Project: 101129136 – SustainaBlue – ERASMUS-EDU-2023-CBHE



Co-funded by
the European Union

